

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Koordinasi antar OPD dalam penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang dilakukan melalui koordinasi vertikal dan horizontal yang lebih bersifat situasional dan responsif. Koordinasi dilaksanakan secara dinamis dengan BPBD Kota Semarang *sebagai leading sector* yang berperan mengkoordinasikan berbagai OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, mulai dari tahap pelaporan, tanggap darurat, sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses koordinasi didukung oleh pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti *Whatsapps*, media sosial, dan *platform* pelaporan kebencanaan, serta pelibatan relawan dan forum FPRB dalam pertukaran komunikasi dan informasi.

Koordinasi ditunjukkan dengan adanya kesadaran antar stakeholders, pembagian peran yang jelas dan keterlibatan OPD teknis, seperti DPU, Disperkim, BPKAD, kelurahan/kecamatan serta OPD lain dalam penanganan pasca bencana. Koordinasi dilakukan untuk pertukaran informasi, komunikasi, pembagian tugas, penyaluran bantuan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Namun demikian, koordinasi masih memiliki kendala dan memiliki kendala dalam sub fenomena koordinasi yaitu kompetensi stakeholders, kesepakatan dan komitmen, dan penetapan kesepakatan oleh pihak yang terlibat.

Untuk rincian permasalahan dalam koordinasi, yaitu bersifat situasional, belum dilakukan secara rutin dan terjadwal, tidak menerapkan situasi siaga/tanggap darurat, integrasi informasi antar OPD belum optimal, proses

birokrasi penyaluran bantuan tidak terduga (BTT) yang panjang menghambat kecepatan penanganan dan belum adanya mekanisme sanksi yang tegas dalam forum koordinasi.

Hambatan vertikal terjadi pada hubungan struktural antara atasan dan bawahan, seperti gangguan komunikasi akibat kondisi darurat bencana longsor, kerusakan infrastruktur komunikasi yang menghambat pertukaran informasi, perbedaan tingkat pemahaman dan keterampilan personel BPBD dengan opd lain dalam penanganan pasca bencana longsor dan kurangnya kesiapsiagaan akibat minimnya pelatihan dan simulasi bagi personel dalam penanganan pasca bencana .

Sementara itu, hambatan horizontal terjadi antar OPD yang memiliki kedudukan setara, seperti perbedaan skala prioritas antar opd, lemahnya integrasi fungsi antar OPD teknis dalam penanganan pasca bencana, keterbatasan anggaran dan ego sektoral yang menyebabkan kurang optimalnya sinergi lintas sektor dalam penanganan pasca bencana. Hambatan ini menghambat upaya penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang.

4.2 Saran

1. Penyederhanaan prosedur birokrasi. BPBD perlu menyederhanakan alur pencairan dana BTT agar prosesnya lebih cepat dan efisien. BPBD perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan BPKAD serta instansi kewilayahan kelurahan dan kecamatan, agar proses pengajuan dana tidak berbelit. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kendala sub fenomena kompetensi stakeholders yang perlu di tingkatkan.

2. Penguatan integrasi komunikasi lintas sektor. Melakukan forum koordinasi rutin yang melibatkan seluruh BPBD dengan OPD lain, seperti DPU, Dinsos, Dinkes, BPKAD, DPU, kelurahan/kecamatan untuk menyamakan persepsi dan tujuan bersama dalam penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang. Mendorong pengembangan sistem informasi yang terpadu antar OPD yang memudahkan dalam pertukaran data, informasi secara *real time*.
3. Pelaksanaan pelatihan dan simulasi secara berkala. Mengadakan latihan rutin terkait penanganan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel agar mampu menerima instruksi dengan cepat, tepat. Latihan ini melibatkan BPBD dengan OPD, seperti DPU, Dinsos, Dinkes, BPKAD, DPU, kelurahan/kecamatan.
4. Penyusunan jadwal koordinasi secara rutin dan terstruktur. BPBD Kota Semarang bersama OPD lain perlu menetapkan agenda koordinasi yang dilakukan secara berkala agar koordinasi tidak hanya bersifat situasional, koordinasi dapat dilakukan pada tahap pra bencana sebagai upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tanah longsor. OPD yang terlibat dalam penanganan bencana longsor, seperti DPU, BPKAD, Dinsos, Dinkes, DPU, kelurahan/kecamatan.